

Lima Jenderal yang "Dimatikan" Soeharto

Akibat konflik dengan Soeharto, lima jenderal ini dan keluarga mereka harus menjalani kehidupan sulit.



Pranoto Reksosamodra



Lima jenderal yang di-persona non grata Soeharto.

MF. Mukthi

Sabtu 03 Maret 2018 WIB

MESKI cenderung menghindari konflik terbuka, Soeharto beberapa kali terlibat konflik baik sejak masih jadi opsir maupun setelah jadi presiden. Ada yang selesai dalam waktu sebentar, tapi tak sedikit yang berbuntut panjang.

Soeharto tak segan-segan menghabisi lawannya. Bukan hanya urusan profesi yang disikat "The Smiling General" bila mengalahkan lawannya, tapi juga wilayah pribadi mereka. Beberapa jenderal merasakan betul hal itu ketika Soeharto berkuasa.

Berikut ini lima jenderal yang pernah berkonflik dengan Soeharto dan berbuntut panjang ke belakang hingga kehidupan pribadi mereka dipersulit oleh sang penguasa Orde Baru.

Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra

Konflik Pranoto dengan Soeharto bermula justru ketika keduanya sedang bersama di pucuk pimpinan Tentara Teritorium (TT) IV Diponegoro. Soeharto sebagai panglima divisi menyelewengkan jabatannya dengan melakukan kegiatan ilegal. Menurut Pranoto, sebagaimana dikutip Salim Said dalam *Gestapu 65: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto*, "penyelewengan [Soeharto] berupa barter liar, monopoli cengkik dari asosiasi pabrik-pabrik rokok kretek Jawa Tengah (PPRK), lalu penjualan besi tua (*scrab material*) yang disponsori oleh orang-orang Tionghoa yang bernama Liem Sioe Liong, Oei Tek Young, dan Bob Hasan."

Dalam melakukan kegiatan ilegal itu, Soeharto menggunakan fasilitas, seperti truk, milik TT IV. Mengetahui hal itu, selaku kepala staf Pranoto dan komandan CPM TT IV Letkol Soenaryo langsung menginvestigasinya. Hasil investigasi kemudian dilaporkan Pranoto ke KSAD Jenderal Nasution, yang hampir menghadiahi Soeharto dengan pemecatan.

Sementara Soeharto menjalani hukuman dengan tugas belajar di Bandung, Pranoto naik menggantikan dirinya sebagai panglima Diponegoro. Keduanya bertemu kembali di Jakarta setelah Soeharto menjabat panglima Kostrad dan Pranoto sebagai Asisten III (Personalia) Menpangad A. Yani.

Konflik keduanya kembali terjadi menyusul hilangnya Menpangad A. Yani yang diculik G30S. Pranoto yang ditunjuk Presiden Sukarno menjadi pelaksana harian Angkatan Darat (AD), tak bisa menghadap presiden karena tak diizinkan Soeharto. Sebab, Soeharto telah mengambilalih pimpinan AD.

"Saya tidak dapat secara langsung menghadap Presiden/Pangti dengan tanpa seizin Mayjen Soeharto sebagai pengganti Pimpinan AD saat itu. Akan tetapi, Mayjen Soeharto selalu melarang saya untuk menghadap Presiden/Pangti," ujar Pranoto dalam *Memoar Mayor Jenderal Raden Pranoto Reksosamodra*.

Soeharto kemudian "mematikan karier" Pranoto dengan menjadikannya perwira tinggi yang diperbantukan pada KSAD. Pada Februari 1966, Soeharto benar-benar mematikan Pranoto, karier maupun pribadi. Lewat Surat Perintah Penangkapan/Penahanan No.37/2/1966 tertanggal 16 Februari 1966, Soeharto menangkap Pranoto.

Soeharto menganggap Pranoto terlibat G30S. "Bukti yang menjadi dasar penahanan Pranoto adalah sepucuk surat dari Kolonel Latif yang berada dalam persembunyian setelah kegagalan Gestapu," tulis Salim Said. Surat itu didapat Soeharto dari intel yang ditugaskan memburu Latif.

Surat itu berisi permintaan perlindungan kepada Pranoto selaku *caretaker* AD. Bagi Soeharto, hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa Pranoto simpati kepada gerakan. Sebab, secara pribadi Latif jauh lebih dulu kenal dan dekat kepada Soeharto ketimbang Pranoto.

Akibat surat Latif yang tak pernah diterima dan diketahuinya itu, Pranoto harus mendekam di balik jeruji Rutan Blok P mulai Maret 1966. Hampir sebulan di Blok P, Pranoto kemudian menjadi tahanan rumah. Dia kembali masuk bui pada awal 1969 ketika Soeharto mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan No. Print.212/TP/1/1969. Pranoto menghuni INREHAB Nirbaya bersama tapol-tapol kelas A lainnya.

Mulai Januari 1975, Pranoto tak lagi mendapatkan hak-haknya seperti gaji *schorsing* atau penerimaan lain. Hingga dibebaskan pada 1981 berdasarkan SK Pangkoptib No. SKEP/04/KOPKAM/1/1981, Pranoto tak pernah menerima surat pemberhentian atau pemecatan resmi dari keanggotaan AD. Meski begitu, dia tak mendapatkan pensiun sampai akhir hayatnya dan namanya tak pernah direhabilitasi -hanya Jenderal Nasution yang langsung menelepon Pranoto untuk meminta maaf karena selama ini salah menilai dirinya. "Saya harus berani menelan pil sepahit ini dan harus pula berani membaca kenyataan dalam hidup yang sudah menjadi suratan takdir," ujarnya sebagaimana dikutip Manai Sophiaan dalam *Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*.

Jenderal TNI AH Nasution

Selaku atasan Soeharto di Angkatan Darat, Nasution punya hubungan pasang-surut dengan juniornya itu. Konflik keduanya bermula ketika Nasution selaku KSAD mengetahui Soeharto (panglima TT VII Diponegoro) melakukan penyelundupan beberapa komoditas bersama pengusaha Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dan Tek Kiong. Soeharto hampir dipecat Nasution sebelum akhirnya ditolong Wa-KSAD Jenderal Gatot Soebroto.

Sikap anti-PKI membuat keduanya bersatu mulai paruh kedua Demokrasi Terpimpin. Nasution dan Soeharto bahu-membahu menumpas PKI usai Peristiwa G30S, menggulingkan Sukarno, dan mendudukkan Soeharto di kursi presiden.

Namun, duduknya Soeharto di kursi presiden justru membuat hubungannya dengan Nasution kembali memburuk. Soeharto membubarkan MPRS yang dipimpin Nasution pada 1972. Sewaktu Nasution membuat buku kesan-kesan selama di MPRS, Soeharto memerintahkan aparatnya untuk membakar buku-buku itu beserta gudangnya.

Gerak-gerak Nasution terus diawasi dan dibatasi aparat. Selain khotbah Jumat, Kopkamtib juga melarang Nasution pidato di kampus-kampus. "Menurut keterangan dari beberapa mahasiswa, mereka selalu dipersulit bilamana mengundang Pak Nas untuk berbicara," tulis Bakri AG Tianlean dan Tatang Sumarsono dalam *AH Nasution di Masa Orde Baru*. Lebih jauh, Kopkamtib melarang media massa memuat tulisan-tulisan Pak Nas, sapaan Nasution.

Kesulitan Pak Nas bertambah setelah dia bergabung ke dalam kelompok Petisi 50, kelompok berisi politisi senior dan purnawirawan jenderal yang berupaya mengoreksi pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah melenceng dengan tafsir sepihak atas Pancasila-nya. Kopkamtib langsung mencabut hak politik para anggota Petisi 50 dan mencekal (cegah dan tangkal) mereka.

Di rumah, Pak Nas harus membuat sumur akibat aliran air ledengnya diputus secara sepihak. Dia juga dilarang tampil di depan publik atau menghadiri acara-acara kenegaraan dan acara-acara yang dihadiri petinggi pemerintahan. "Saya dan istri tidak boleh diundang pada acara perkawinan anak-anak Bu Gatot Subroto, Bu Yani, Bu Suprpto, dan lain-lain," kenang Nasution.

Saat melayat Adam Malik, Pak Nas langsung didorong anggota Paspampres ketika hendak menyolatkan jenazah dan diperintahkan keluar. Alasannya, saat itu Wapres Umar Wirahadikusuma, ajudan Nasution semasa revolusi, sudah akan masuk ke rumah duka.

Pak Nas pun menilai, tuduhan penguasa bahwa para penandatangan Petisi 50 berkomplot untuk merebut kekuasaan sama dengan tuduhan PKI terhadap dirinya dan pimpinan Angkatan Darat semasa Demokrasi Terpimpin.

Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso

Meski hubungan Hoegeng dan Soeharto awalnya baik, keduanya akhirnya berkonflik. Kejujuran dan ketegasan Hoegeng dalam memberantas korupsi, penyelundupan, dan beragam bentuk kejahatan lain mengusik Cendana.

Saat kasus Sum Kuning muncul akhir 1960-an, Hoegeng tergerak untuk mengusut tuntas. Hoegeng yakin hasil akhir persidangan kasus pemerkosaan pedagang telur bernama Sumarijem oleh beberapa anak pejabat itu penuh rekayasa. Alih-alih memberi keadilan terhadap korban, hakim justru menjadikan Sumarijem tersangka.

Hoegeng langsung membentuk sebuah tim. Namun, belum lagi tim itu mendapat banyak hasil, Soeharto keburu mengambilalih kasus itu. Ketika menerima Hoegeng, Soeharto mengatakan penanganan kasus Sum Kuning diambilalih Kopkamtib.

Soeharto benar-benar marah ketika Hoegeng membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robby Tjahjadi. Penyelundupan itu, sepenelusuran Hoegeng, terjadi akibat adanya *backing* dari aparat. "Yang mengejutkan Hoegeng adalah ketika dia mau menemui Soeharto di kediamannya untuk memberitahukan si penyelundup mobil akan ditahan, ternyata si penyelundup mobil tersebut sedang bertemu dan berbincang-bincang dengan Soeharto," tulis Aris Santoso dkk. dalam *Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa*.

Hoegeng yang sejak itu tak pernah percaya Soeharto lagi, dicopot dari jabatannya tak lama kemudian. Dengan tegas dia menolak tawaran basa-basi Soeharto berupa jabatan duta besar.

Keduanya kembali berkonflik ketika Hoegeng bergabung dengan Petisi 50. Kelompok itu aktif mengoreksi penyelewengan Orde Baru karena menafsirkan sepihak Pancasila untuk kepentingannya dan menuduh pihak dengan tafsir Pancasila beda sebagai anti Pancasila.

Hoegeng langsung kena cekal, kehilangan hak politik, dan dilarang tampil publik. Hal itu membuat banyak orang jadi takut mendekati Hoegeng. Suatu ketika, seorang pengusaha sampai membatalkan rencana pembelian lukisan karya Hoegeng karena di lukisan itu tertera inisial nama sang pelukis. Pengusaha itu sempat meminta Hoegeng menghapusnya tapi ditolak.

Acara Hoegeng dan band The Hawaian Seniors-nya di TVRI langsung distop Menpen Ali Murtopo dengan alasan tak sesuai budaya bangsa. Pangkoptib Laksamana Soedomo menghimbau masyarakat agar hati-hati terhadap lagu-lagu yang dibawakan Hoegeng.

Penghentian acara di TVRI itu bentuk penutupan akses ekonomi oleh penguasa. "Hoegeng bahkan tidak punya uang untuk sekedar memperbaiki giginya karena digencent sama Harto!" kata Ali Sadikin sebagaimana dikutip Made Supriatma dalam tulisannya di *indoprogress.com*, "Selamat Ulang Tahun, Jenderal Jagal Besar!". Sejak 1987, Hoegeng juga tak diziinkan pemerintah menghadiri perayaan HUT Polri.

Letjen KKO (Purn.) Ali Sadikin

Konflik Ali dengan Soeharto baru dimulai justru ketika Ali sudah pensiun dari militer maupun pemerintahan. Konflik bermula dari upaya Ali dan beberapa pensiunan jenderal serta politisi senior menggagas pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto pada 1980. Pernyataan korektif kelompok yang kemudian dikenal sebagai Petisi 50 itu membuat Soeharto marah.

Lewat Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) yang dipimpin Laksamana Sudomo, junior Ali di AL, Soeharto langsung bertindak. Awalnya, Soeharto sempat memerintahkan Sudomo untuk menangkap Ali. Sudomo menolak dan sebagai gantinya, dia mem-*persona non grata*-kan atau membunuh secara perdata Ali.

Sama seperti penandatanganan Petisi 50 lainnya, Ali langsung kena cekal. Saat hendak mengantarkan istrinya berobat ke Belanda tahun 1986, dia dihalangi Imigrasi. Ali bahkan tak mendapat izin untuk menunaikan ibadah haji.

Penguasa juga melarang Ali menghadiri acara-acara kenegaraan atau perayaan hari-hari nasional. Pemerintah bahkan meminta kedutaan asing di Jakarta untuk tak mengundang Ali dalam acara-acara mereka. Yang konyol, Ali tak diizinkan hadir dalam perayaan pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) meski acara tahunan ibukota itu buah gagasan Ali semasa menjabat gubernur DKI.

Di ranah privat, Ali mendapat larangan menghadiri resepsi-resepsi yang dihadiri presiden. Akibatnya, kata Ali di dalam *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*, "Orang yang sudah mengundang saya memohon agar undangan yang sudah diberikan dianggap saja tidak ada dan karena itu, ia memohon maaf. Belakangan ada juga yang mengatakan tetap mengharapkan kehadiran saya, tetapi jamnya ditentukan."

Persona non grata tak hanya menimpa Ali pribadi, tapi juga keluarganya. Boy Sadikin, putra sulung Ali, merasakan betul kesulitan yang ditimpakan pemerintah saat dia hendak meminjam dana dari bank untuk modal usaha. Pengajuannya berulang kali selalu menemui penolakan. Pemerintah sengaja menutup akses pinjaman bank, terutama bank negeri,

kepada keluarga Ali. Hal itu diketahui setelah Ali menelepon direktur sebuah bank dan menanyakan alasan mengapa pengajuan kredit anaknya selalu gagal.

Letjen TNI H.R. Dharsono

Sebagai salahsatu panglima andalan Soeharto ketika berupaya menggulingkan Sukarno, Dharsono jelas memiliki hubungan manis dengan "the smiling general". Soeharto mengangkat Dharsono menjadi panglima Siliwangi -menggantikan Ibrahim Adjie, seorang panglima dengan reputasi anti-korupsi dan pendukung Sukarno- sebagai hadiah dari jasa yang telah diberikannya.

Konflik Dharsono dengan Soeharto baru terjadi ketika Soeharto sudah 10 tahun menjabat presiden dan Dharsono menjabat sekretaris jenderal ASEAN. Ketika berpidato di depan Eksponen 66 di Bandung, Januari 1978, Dharsono melontarkan kritik terhadap pemerintah *cum* ABRI yang dinilainya makin melenceng.

Kritik Dharsono langsung menuai kemarahan penguasa. Kemarahan itu makin bertambah karena Dharsono enggan mengabulkan tuntutan permintaan maaf dari pemerintah. Akibatnya, Dharsono pun mesti kehilangan jabatan di Setjen ASEAN.

Namun alih-alih berubah jadi "jinak", Dharsono justru makin membuat penguasa berang lantaran bergabung ke dalam Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI AD, yang mengambil sikap kritis terhadap penguasa. Setelah Fosko dibubarkan pemerintah, Dharsono mendekati Petisi 50. Meski tak menjadi anggota, hal itu makin membuat penguasa benci. Terlebih, Dharsono makin dekat dengan kalangan Islam.

Setelah Dharsono dan 22 tokoh -mayoritas anggota Petisi 50- menandatangani pernyataan gugatan terhadap pembantaian kalangan Islam oleh ABRI dalam Peristiwa Tanjung Priok, pemerintah lewat plot janggalnya langsung menangkap dia pada 8 November 1984 dan memejahijaukannya. Dharsono dituduh terlibat dalam komplotan Islam garis keras yang meledakkan BCA di Jakarta Kota.

Meski kemudian mendapat pemotongan tiga tahun masa tahanan, Dharsono yang tak pernah mau minta grasi kepada presiden harus mendekam enam tahun di LP Cipinang. Begitu bebas tahun 1990, Dharsono mengalami pengucilan sebagaimana musuh-musuh Orde Baru lain.

Setelah meninggal dunia pada 5 Juni 1996 akibat tumor otak, pemerintah tak mengizinkan jenazah Dharsono dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. "Soeharto punya kebencian dan ketakutan pribadi terhadap HR Dharsono yang merupakan seorang

panglima, jenderal sungguhan dari Siliwangi, yang berani melawan Soeharto," kata Adnan Buyung Nasution, pengacara yang membela Dharsono, dalam otobiografi berjudul *Pergulatan Tanpa Henti: Menabur Benih Reformasi*.

Kematian Jenderal yang Diasingkan

by [hendijo Agustus 4, 2014](#)

<http://arsipindonesia.com/hikayat-nusantara/orde-baru/kematian-jenderal-yang-diasingkan/>



LETJEN MARINIR HARTONO. Loyalitasnya kepada Soekarno tak diragukan.
(foto:dokumenpribadi/milik keluarga besar Hartono)

Loyalis Presiden Sukarno itu tewas dalam kondisi kepala tertembus peluru.

MALAM SEMAKIN LARUT di kawasan Jalan Prof.Dr.Soepomo, Jakarta. Jarum jam hampir menunjukan angka sebelas, saat Atit melangkah menuju ruang kerja sang paman: Letnan Jenderal KKO AL(Korps Komando Angkatan Laut) Hartono. Maksud hati ingin berpamitan untuk pulang ke rumahnya di Tanjung Priuk, namun apa daya belum sempat meraih gagang pintu, gadis kecil belasan tahun yang masih duduk di bangku SMP itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara tangan menggebrak meja, disusul oleh bentakan keras sang paman: "Saya hanya takut kepada Saptamarga!"

Saptamarga adalah tujuh pasal yang harus dipatuhi oleh para prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam setiap upacara militer, pasal-pasal itu kerap dibacakan dan menjadi pengingat bahwa mereka terikat pada sumpah tersebut.

Alih-alih melanjutkan niatnya, Atit malah memutuskan untuk balik badan saja. Ia mafhum, sebagai seorang pejabat, pamannya itu pasti sedang sibuk membicarakan hal-hal penting terkait pekerjaannya sehari-hari. Terlebih saat itu, ia tahu ada beberapa orang yang

nampaknya tamu penting tengah dihadapi oleh pamannya. Singkat kata, malam itu Atit pun pulang ke Tanjung Priuk tanpa sempat bertegur sapa dengan Hartono.

Tengah malam telah berlalu. Hari memasuki Rabu, 6 Januari 1971. Sekitar jam satu, Hartono keluar dari ruang kerja dan meminta pembantu rumah untuk membuat kopi sebanyak dua cangkir. Selanjutnya, tak jelas apakah pesanan kopi itu jadi disuguhkan atau tidak.

"Pembantu rumah yang semula mengaku dipesani untuk membuat dua cangkir kopi oleh suami saya, pada perkembangan selanjutnya justru menyangkal pengakuannya tersebut," ujar Grace Barbara Walandaow (76) yang tak lain adalah istri dari Hartono.

Tewasnya Hartono pertama kali diketahui oleh Nyonya Prawirosoetarto (ibunda Hartono) saat menjelang adzan subuh. Lazimnya setiap pagi, ia bergegas menuju dapur untuk ikut menyiapkan sarapan. Saat menuju dapur inilah, sekilas perempuan sepuh ini melihat Hartono tengah berbincang-bincang dengan dua tamunya di ruang kerja yang pintunya terbuka.

Namun baru saja akan bersiap-siap membuat sarapan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara kaca pecah yang datang dari tempat Hartono tengah berbicara dengan dua tamunya tersebut. Tanpa ba bi bu, Nyonya Prawirosoetarto bergegas lari ke depan dan begitu menyaksikan pemandangan di ruang tamu, lemaslah sekujur tubuhnya...

"Saya temukan Hartono terduduk di kursi dengan darah membasahi bagian belakang kepala. Di sampingnya kaca jendela pecah berantakan kena tembakan..."demikian pengakuan Nyonya Prawirosoetarto seperti dicatat oleh Julius Pour dalam *G30S, Fakta atau Rekayasa*.

Loyalis Presiden Sukarno

Di dunia tentara, khususnya di kalangan prajurit KKo AL, Hartono bukanlah nama yang asing. Para prajurit kesatuan elite itu mengenang Hartono sebagai komandan yang memiliki perhatian tinggi terhadap kesejahteraan para anak buahnya. Menurut salah satu mantan ajudannya, Krisna Rubowo, tak jarang secara tiba-tiba ia diajak Hartono untuk berkeliling asrama, memeriksa langsung apakah kebutuhan pokok para prajurit dan keluarganya sudah terpenuhi atau belum.

"Jadi jauh sebelum Jokowi mempopulerkan istilah *blusukan*, Pak Hartono sudah melakukannya dahulu," kata pensiunan Kolonel KKo AL tersebut.

Selain perhatian, kharisma dan ketegasan sikapnya, loyalitas Hartono terhadap Presiden Sukarno tak perlu diragukan lagi. "Hitam komando Bung Karno, Hitam tindakan KKo, putih

komando Bung Karno, putih tindakan KKo..."katanya dalam sebuah pidato di depan anak buahnya.

Kata-kata Hartono itu sesungguhnya bukan sekadar gertak sambal atau isapan jempol belaka. Buktinya, saat Jakarta "dikuasai" kelompok Letnan Jenderal Soeharto cs pasca Gerakan 30 September yang gagal tersebut, dari basisnya di Surabaya, Hartono konon sudah menyiapkan 30.000 prajurit KKo untuk menggempur ibu kota. "Akan tetapi, Presiden Sukarno tidak pernah mengeluarkan komando yang sedang mereka tunggu-tunggu tersebut..." tulis sebuah laporan penelitian dari tim Insititut Studi Arus Informasi (ISAI) yang berjudul *Bayang-Bayang PKI*.

Bahkan seolah ingin meyakinkan Presiden Sukarno akan kekuatan para loyalisnya, tepat pada peringatan ulang tahun Bung Karno yang ke-65 (6 Juni 1966), KKo AL secara besar-besaran melakukan "unjuk gigi" di Surabaya. Selain mengerahkan hampir seluruh pasukan, semua senjata berat mutakhir saat itu seperti tank dan amphibi juga dikeluarkan untuk melakukan pawai keliling Surabaya.

"Barisan pasukan tersebut diikuti ribuan massa, panjangnya sampai 30 km..." tulis Jenderal Soemitro dalam *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional : Memoar Jenderal TNI (Purn.) Soemitro* (Saleh A. Djamhari ; editor Soegiarto, Ramadhan Kartahadimadja).

Barisan prajurit KKo dan massa rakyat itu berpawai dalam "semangat yang menggila". Aksi-aksi provokatif pun dilontarkan mereka terhadap instansi-instansi yang dinilai pro Soeharto. Sebagai contoh, saat dengan sengaja barisan tersebut melewati rumah dinas Panglima Kodam Brawijaya di Jalan Raya Darmo, massa secara bergelombang menyerukan kata-kata: "Bung Karno Jaya! Bung Karno Jaya!"

Sebelumnya Hartono juga sempat memerintahkan 2 batalyon KKo untuk membuka pos taktis di Yogya, menyusul maraknya aksi menentang Bung Karno di kota gudeg tersebut. Menurut Julius Pour, inilah bentuk "tantangan" Hartono untuk Soeharto yang saat itu juga tengah mengerahkan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) ke Yogya untuk memburu orang-orang PKI dan para Sukarnois.

Banyak kalangan yang menyebut loyalnya Hartono kepada Bung Karno terkait soal ideologi. Kendati seorang militer, Hartono disebut diam-diam adalah seorang penganut marhaenisme garis keras. Soal ini dibantah oleh Nenny Hartono. Menurut putri ketiga dari Hartono tersebut, kesetiaan sang ayah terhadap Presiden Sukarno semata-mata hanya karena disiplin tentara.

"Papa itu seorang tentara tulen. Ia enggak peduli politik. Karena yang ia tahu Bung Karno adalah pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata yang segala perintahnya harus

dituruti sesuai saptamarga, maka siapapun yang melawan Bung Karno maka ia akan menjadi musuhnya pula," ujar Nenny.

Hal ini juga diakui oleh Grace Walandaow. Menurut perempuan Manado kelahiran Surabaya itu, suaminya memang tak pernah menampik tugas apapun yang dibebankan kepada dirinya. Ketika di akhir tahun 60-an, Hartono "didubeskan" oleh Soeharto ke Korea Utara, ia tak mengeluh atau berniat menolak perintah tersebut. "Saya tak berhak menolak perintah atasan. Saya ini seorang tentara," ujar Grace menirukan ungkapan sang suami kepadanya.

Diasingkan Jakarta

Ketika dikabari oleh Krisna Rubowo tentang meninggalnya sang suami, pada awalnya Grace dan keempat putrinya yang berada di Pyongyang sama sekali tak percaya. "Ya bagaimana mau percaya, ia waktu terakhir pergi dari Pyongyang ada dalam keadaan sehat walafiat," ungkap Grace.

Namun setelah diyakinkan oleh Krisna, Grace akhirnya percaya. "Bu Grace menerima kabar itu dengan sangat tegar," kenang Krisna.

Sebelumnya, kepada Grace, Hartono berpamitan akan berangkat ke Tokyo untuk mengikuti pertemuan para duta besar Indonesia se-Asia Pasifik di sana. "Sebelum ulang tahun Mama, saya pasti pulang," janjinya.

Tapi manusia hanya bisa berencana. Begitu sampai Tokyo dan bertemu dengan beberapa rekan KKO-nya yang juga



DIANGKAT JADI DUBES. Letjen Marinir Hartono usai upacara pengangkatan dirinya sebagai duta besar RI untuk Korea Utara (dokpribadi/milik keluarga besar Hartono)

"didubeskan" (diantaranya Laksamana Mulyadi), Hartono mendengar "kabar miring" sekitar KKO AL. Selain mendengar kabar "penciutan" kekuatan KKO, ia juga diberi informasi tentang adanya Operasi Lumba-Lumba. Itu adalah upaya pemerintah Soeharto membersihkan Angkatan Laut dari anasir PKI dan pendukung Bung Karno. Hartono

berang. Ia lantas memutuskan usai pertemuan, tidak pulang ke Pyongyang namun langsung ke Jakarta untuk memastikan soal ini dan jika perlu memprotes keputusan tersebut.

Ketika sampai di Jakarta, "situasi aneh" mulai dirasakan Hartono. Tidak seperti kebiasaan pejabat tinggi negara pada umumnya yang selalu mendapat jemputan begitu tiba di Bandar Udara Kemayoran Jakarta, saat itu Hartono sama sekali sonder jemputan sopir terlebih pengawalan khusus. "Ia seolah mulai diasingkan oleh Jakarta," ujar Krisna. Ia baru bisa pergi dari bandara menuju rumahnya ketika secara kebetulan bertemu dengan salah seorang sopir dari AL yang selesai mengantarkan seorang tamu.

Menurut Els J. Item (sepupu Grace), selama di Jakarta, Hartono banyak bertemu dengan beberapa kalangan penting. Mulai bertemu Laksamana Sudomo (KASAL) hingga menemui Soeharto yang saat itu sudah menjadi presiden. Ia juga ditenggarai bertemu dengan beberapa tokoh intelijen seperti Yoga Sugama dan Ali Moertopo. "Bahkan sebelum ke Jakarta, ia sempat ke Bangkok untuk bertemu dengan H.R. Dharsono yang dikenal sebagai tukang kritik Bung Karno. Ada apa dua perwira tinggi yang memiliki pandangan berbeda saling bertemu?" ungkap jurnalis sepuh yang selama sisa usianya seolah tanpa lelah terus melakukan penyelidikan terkait pembunuhan suami sepupunya tersebut.

Tak jelas apa hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut, kecuali pada 6 Januari 1971, Hartono memutuskan untuk balik ke Pyongyang. Namun beberapa jam sebelum ia menaiki pesawat, sebutir peluru keburu menghabisi hidupnya. Sang loyalis yang sedang marah dan kecewa itu akhirnya terbungkam.

Bunuh Diri atau Dibunuh?

Grace sendiri dan keempat putrinya baru bisa pulang ke Jakarta, dua minggu setelah sang suami dikebumikan di Taman Malam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Maklum saja, pesawat rute Pyongyang-Moskwa-Singapura-Jakarta hanya ada sekali penerbangan dalam dua minggu.

Ketika melukisakn kedatangannya ke Jakarta 43 tahun lalu itu, Grace mengenangnya sebagai persitiwa yang tidak menyenangkan. Dalam situasi berduka, dari Bandara Udara Kemayoran, ia langsung dilarikan petugas dari Corps Polisi Militer (CPM) ke Mess Perwira Tinggi AL di Kwini guna menghindari kejaran para wartawan.

" Beberapa media saat itu menyebut saya tak mau memberikan keterangan apapun. Yang benar saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan wartawan," kenang Grace.

Saat di Kwini, dua perwira tinggi AL yakni Laksamana Sudomo dan Laksamana Madya TNI. H. L. Manambai Abdulkadir datang menemui Grace. Dalam pertemuan itu, tercetuslah "versi Sudomo" tentang penyebab kematian Hartono.

" Grace, ini sudah jelas ia..." ujar Sudomo seraya memperagakan dengan tangannya adegan seseorang menembak kepala dengan sepucuk pistol. Sudomo berkilah Hartono nekat bunuh diri karena kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah yang menciutkan KKO

" Tapi walau demikian, biar keluarga dan anak-anak senang, kami akan memakamkan Pak Hartono di Kalibata, " ujar Abdulkadir.

Grace naik pitam. Dengan menahan marah, ia kemudian berkata kepada dua lelaki yang tak lain rekan suaminya di AL tersebut: " Saya tidak peduli ia dimakamkan di mana. Sekalipun ia dimakamkan di depan rumah, saya tidak masalah. Apapun yang terjadi dengan Hartono, ia adalah tetap suami saya dan ayah dari keempat putri saya."



DIMAKAMKAN DI KALIBATA. Jenazah Letjen Marinir Hartono saat diusung menuju tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan
(dok pribadi/milik keluarga besar Hartono)

Hingga kini, Grace dan seluruh keluarga besar Hartono tak pernah mempercayai kata-kata Sudomo dan Abdulkadir tersebut. Bagi mereka, sangat naif jika karena urusan "penciutan" tersebut, Hartono lalu nekat mengakhiri hidupnya. "Tentunya saya hafal sekali Hartono. Bukan gaya dia melakukan itu jika ada masalah, walau separah apapun situasinya," ujar Grace.

Grace memang wajar menyangsikan Hartono nekat menembakan Makarov berperedam suara itu ke kepalanya sendiri. Ia malah menyebut pistol yang ditemukan tergeletak di meja usai Hartono terbunuh, bukan sebagai milik suaminya. "Saya tahu pistol yang selalu dibawa suami saya adalah jenis FN," ungkapny. Selain itu, pihak keluarga besar Hartono juga mempertanyakan pihak CPM yang tak membawa jasad Hartono ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) namun ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).

"Padahal jarak rumah kami dengan RSAL lebih dekat dibandingkan ke RSPAD,"kata Grace.

Hasil otopsi dari RSPAD pun tak pernah mereka dapatkan. Bahkan alih-alih surat hasil otopsi, barang-barang milik almarhum yang dibawa pihak aparat pun tak juga dikembalikan sampai sekarang. "Termasuk kaset lagu anak-anak Chicha Koeswojo yang akan Papa hadiahkan buat kami, ikut raib juga,"kenang Nenny Hartono.

Dipulangkannya jasad Hartono dalam kondisi sudah berpeti dan dilarang dibuka kembali, menjadikan keluarga besar Hartono semakin curiga bahwa kematian sang jenderal tidak wajar. Menurut Els J. Item, ia yakin bahwa Hartono memang sengaja dibunuh.

" Usai peristiwa itu dan sebelum kedatangan petugas CPM untuk kedua kalinya, saya sempat ke ruangan Hartono dan melihat ada lubang bekas tembakan di lemari dekat jendela," ujar perempuan yang kini berdomisili di Amerika Serikat tersebut. Lalu bagaimana sikap KKO sendiri atas tewasnya Hartono?

Di bawah Kasal Laksamana Sudomo, ada kesan sikap KKO AL tidak transparan terhadap peristiwa tersebut. Alih-alih meminta kasus itu diseldiki secara tuntas, lima bulan kemudian, Markas Besar KKO AL malah mengeluarkan Surat Keterangan No:343/BPERS/KKO/1971.

Di surat keterangan kematian sekaligus penegasan pemberhentian Hartono dari AL itu hanya disebut yang bersangkutan: "...telah meninggal dunia pada hari Rabu 6 DJANUARI 1971, dan telah diberhentikan dari dinas Angkatan Laut berdasarkan Berita-Pos Kasal No.P/5/4/12 tanggal 13 APRIL 1971..."demikian salah satu bunyi surat keterangan yang ditandatangani Mayor (KKO) Tri Soewarto selaku Perwira Bagian Personil Korsk Komando Angkatan Laut Republik Indonesia. Selanjutnya tak ada kabar lain. Kasus tewasnya Hartono seolah sengaja dilupakan begitu saja.

Kepada Els J. Item, pengamat militer Indonesia Ken Conboy malah pernah menyatakan keheranannya ketika akan memeriksa arsip-arsip riwayat Hartono di Markas Besar ABRI. Di sana, ia tak menemukan satu berkas pun " Cuma ada namanya saja tapi isinya kosong. Lalu kemana? Ya data-data Hartono bisa jadi sengaja dihilangkan," ujarnya kepada saya beberapa waktu lalu.

Namun demikian diam-diam banyak petinggi KKO AL (selanjutnya berubah menjadi Korps Marinir AL) terkesan kurang percaya terhadap versi Sudomo dan pemerintah (disampaikan oleh Menlu Adam Malik saat itu) bahwa kematian Hartono karena pendarahan otak. "...bukti yang ditemukan tidak mendukung motif untuk melakukan bunuh diri,"ujar Letnan Jenderal (Marinir) Kahpi Suriadireja, Komandan Jenderal Marinir 1977-1983 kepada program *Lacak di Trans TV* pada 2004,

Dalam program yang sama, sesepuh KKO AL Letnan Jenderal (KKO) Ali Sadikin juga menyatakan ketidakpercayaannya terhadap keterangan resmi pemerintah tersebut. Ia bahkan mengatakan lebih gamblang: "Saya mendapat informasi bahwa Hartono dibunuh akibat terjadinya konspirasi tingkat tinggi,"kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Empat tahun setelah pernyataan para sesepuh Marinir di *Trans TV* itu, Mayjen (Marinir) Nono Sampono seolah memuncaki "ketidakpercayaan" korps elite AL itu terhadap isu sumir kematian sang senior 37 tahun sebelumnya. Dengan bangga, mereka mengabadikan nama "Hartono" untuk nama kesatriaan Markas Korps Marinir di Cilandak. " Saya yang didaulat untuk ikut membuka secara resmi penyematan nama tersebut,"kenang Grace.

Kembalinya nama "Hartono" di lingkungan AL memang seolah sudah seperti suratan takdir. Seperti kata sebuah pepatah: pada akhirnya kehormatan memang selalu datang untuk yang berhak. (hendijo)